

ABSTRAK

KEBERADAAN KANTOR PERWAKILAN BPJS KETENAGAKERJAAN YANG BERADA DI LUAR NEGERI GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG MENGALAMI PEMASALAHAN DALAM BIDANG ASURANSI SOSIAL

Tri Meiliana

(1387036)

Para pekerja di dalam negeri diberikan perlindungan berupa asuransi BPJS Ketenagakerjaan, begitu pun dengan para pekerja di luar negeri. Di Indonesia keberadaan kantor perusahaan asuransi sudah ada di setiap provinsi sehingga para pekerja ketika ingin mengajukan klaim dapat dengan mudah untuk mengurus klaim tersebut. Sedangkan untuk para pekerja di luar negeri kantor perwakilan perusahaan asuransi tidak ada sehingga mempersulit bagi TKI yang akan mengajukan klaim. Sehingga perlindungan terhadap TKI apabila tidak adanya kantor perwakilan perusahaan asuransi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada dan perlindungannya harus sama antara pekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada tidak adanya kantor perwakilan perusahaan asuransi di luar negeri adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perasuransian, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Pendekatan kasus terhadap permasalahan yang terjadi juga dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di perlukan bagi TKI yang berada di luar negeri. Meskipun dalam ketentuan yang berkaitan dengan asuransi TKI tidak dijelaskan bahwa kantor BPJS Ketenagakerjaan tidak harus berdekatan akan tetapi para TKI harus mendapat proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil di mana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Meskipun keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan tidak ada di negara di mana para TKI bekerja, pemerintah tetap melakukan perlindungan kepada TKI. Apabila TKI sakit, kecelakaan selama bekerja dan meninggal dunia, PPTKIS wajib untuk mengurus sampai TKI tersebut sembuh sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-104 A/Men/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Pemerintah sebaiknya mengatur mengenai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri untuk mempermudah para TKI ketika ingin mengajukan klaim mengenai asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu TKI harus lebih berhati-hati, teliti dan cerdas dalam bekerja. Dan untuk PPTKIS harus memberikan informasi kepada para calon TKI/TKI yang akan bekerja keluar negeri.

Kata Kunci : *Tenaga Kerja Indonesia, Asuransi TKI, BPJS Ketenagakerjaan, PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF BPJS KETENAGAKERJAAN REPRESENTATIVE WHICH LOCATED OUTSIDE COUNTRY TO ENSURE LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN LABOR (TKI) WHO FACING PROBLEMS IN SOCIAL INSURANCE SECTOR

Tri Meiliana

(1387036)

Workers inside the country are given protection in the form of BPJS Ketenagakerjaan as well as the workers outside the country. In Indonesia the existence of an insurance company's office already exists in every province so that the workers when they want to make a claim can be easy to manage the claim. Whereas overseas workers the representative office of the insurance company does not exist so it makes it difficult for the TKI who will propose a claim. Meanwhile the protection of TKI when the representative office of the insurance company does not exist must be equivalent with the provisions of the existing law and the protection must be the same between workers in the country or abroad.

The research method used to analyze problems in the absence of representative offices of insurance companies abroad is a normative juridical method that is the method done by processing secondary legal materials in the form of library resources to obtain theoretical data that can be used as a foundation in research. In addition, there are also approaches to various laws and regulations, namely the Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perasuransian, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. A case approach to the problems that happen is also needed to conduct this research.

The result of this research show that the existence of representative of BPJS Ketenagakerjaan needed for TKI live in foreign country. Although in the provisions relating to the insurance of TKI are not explained that the office of BPJS Ketenagakerjaan should not be close but TKI should get a fast, simple, accessible and fair process which is regulated in Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Although the existence of the office of BPJS Ketenagakerjaan does not exist in the country where TKI work, the government keeps protecting TKI. If the TKI is sick, accidents during work and death, PPTKIS is obliged to take care TKI until healed in accordance with the provisions Pasal 59 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-104 A/Men/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. The government should arrange the representative offices of BPJS Ketenagakerjaan outside country to simplify the TKI when they want to make claims about insurance BPJS Ketenagakerjaan. In addition to TKI should be more careful, thorough and smart in the work. And for PPTKIS must provide information to TKI applicant / TKI who will work abroad.

Keywords: *Indonesian Workers, TKI Insurance, BPJS, PPTKIS (Private Employment Placement Company of Indonesia) and Legal Protection.*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
PENGESAHAN REVISI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DAN DI LUAR NEGERI	
A. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	
1. Tenaga Kerja Indonesia	30
2. Perjanjian Antara Pekerja dan Pengusaha	32
a. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja	32
b. Hak Pekerja dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha	37
B. Penempatan Tenaga Kerja	42

1. Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri	44
2. Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	47
C. Peran Pemerintah Dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	49
1. Pengertian Perlindungan Hukum	49
2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	51
3. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	54
4. Penyelenggara Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	60
BAB III ASURANSI BAGI TKI DAN PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA	
A. Asuransi Sebagai Sarana Pertanggungans Risiko	
1. Pengertian Risiko	64
2. Penaggungan dalam Risiko	68
3. Perjanjian Asuransi	70
4. Polis Asuransi	74
5. Asas dalam Hukum Asuransi	76
6. Macam-macam Asuransi	78
7. Asuransi Sosial	80
B. Perusahaan Asuransi Sebagai Penyelenggara Penanggungan	
1. Perusahaan Asuransi	82
2. Pihak Ketiga Sebagai Perantara	85
C. Asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia	
1. Asuransi untuk Tenaga Kerja	87
2. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	92
BAB IV ANALISIS URGENSI KEBERADAAN KANTOR PERWAKILAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI LUAR NEGERI BAGI PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.	

A. Keberadaan Kantor Perwakilan BPJS di Luar Negeri untuk Tenaga Kerja Indonesia	
1. Keberadaan Kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan	99
2. Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Luar Negeri Untuk Tenaga Kerja Indonesia.....	106
B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri Ketika Tidak Ada Kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan	
1. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri	114
2. Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Bila Tidak Ada Kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Di Luar Negeri	127
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	
(<i>Curriculum Vitae</i>)	
(Matrix Revisi)	